



# Urgensi "Policy Mix"

Oleh Mudrajad Kuncoro  
Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sumber: **SUARA PEMBARUAN**

Senin, 12 Januari 2009

<http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=3581>

Bauran kebijakan (policy mix) yang sinergis antara kebijakan moneter dan fiskal diharapkan membantu perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global. Pelemahan ekonomi global yang lebih dalam dan kontraksi ekonomi di berbagai sektor diperkirakan akan mendorong pelemahan kinerja ekspor secara signifikan. Di sisi domestik, menurunnya penerimaan ekspor, serta tersendatnya sumber pembiayaan perbankan, akan menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.

Tantangan ke depan makin berat karena koordinasi moneter dan fiskal harus senantiasa diupayakan secara konsisten dengan memperhatikan kapasitas ekonomi dan skala prioritas. Koordinasi perlu diletakkan dalam dimensi kebijakan makroekonomi yang terintegrasi, dilandasi spirit striking the optimal balance.

Itulah garis besar butir pemikiran Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 15 Desember 2007. Miranda menyampaikan orasi berjudul Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Tantangan dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pidato Miranda dan buku terbarunya *Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience* kini benar-benar relevan digunakan untuk mengkaji sejauh mana bauran kebijakan moneter dan fiskal dapat menjadi stimulus perekonomian Indonesia yang diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 5% tahun ini, menurun dibanding 2008 (6,2%).

Harus diakui, di masa pemerintahan SBY-JK, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi makro sudah jauh menurun dibanding masa lalu. Setidaknya, ini tercermin dari survei Bank Dunia dan laporan Bank Indonesia selama tiga tahun terakhir.

Angka-angka indikator makro ekonomi pun boleh dikata berada dalam kondisi cukup "terkendali" meski bukannya tanpa gejolak. Ini terlihat setidaknya dari indikator makro utama selama 2005-2008, yakni pertumbuhan ekonomi di era SBY-JK tercatat rata-rata 6% per tahun, jauh lebih tinggi dibanding masa Megawati yang hanya 4% per tahun, inflasi bulanan year on year berkisar antara 5,77% - 18,38%, BI Rate antara 8,5% - 12,75%, dan rata-rata kurs harian rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.424. Rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus menurun

dari tahun ke tahun. Perbaikan kinerja neraca pembayaran bermuara pada peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan dari US\$ 34,724 miliar pada 2005 meningkat menjadi US\$ 51,6 miliar pada triwulan IV 2008, atau setara dengan 4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

## Stimulus Fiskal

Urgensi koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan sangat tampak ketika ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian dan gejolak eksternal, seperti lonjakan harga minyak maupun volatilitas kurs. Dalam literatur ekonomi makro dikenal bauran kebijakan dengan model koordinasi "Leader-follower". Artinya koordinasi harus mengacu kepada urutan (sequence) tindakan kebijakan, di mana salah satu otoritas harus melahirkan kebijakan terlebih dulu berdasarkan tantangan lingkungan eksternal, baru direspons oleh otoritas kebijakan lainnya.

Pemerintah mengumumkan akan menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBN 2008 sebesar Rp 51,3 triliun untuk memberi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengerem gelombang PHK tahun ini. Melalui stimulus fiskal, pemerintah mencoba mengantisipasi merosotnya aktivitas ekonomi nasional. Stimulus tersebut akan dialokasikan untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Dana Subsidi, Pajak Penghasilan (PPH) 21 yang Ditanggung Pemerintah dan Bantuan Program.

Apakah APBN 2009 dapat menjadi stimulus perekonomian nasional? Dengan besaran APBN 2009 yang mendekati angka Rp 1.100 triliun, rasio volume APBN terhadap PDB 2009 sekitar 21%. Artinya, APBN diharapkan masih memiliki daya dorong bagi perekonomian nasional. Konsumsi pemerintah dalam APBN diperkirakan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi nasional 2009 dengan pertumbuhan sebesar 10,4%, sementara konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor masing-masing diproyeksikan hanya tumbuh 4,8%, 6,5%, dan 5,9%. Alokasi belanja negara dalam APBN 2009 mencapai Rp 1.037 triliun, dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi (21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan kata lain, lebih dari 70% alokasi pengeluaran APBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagaimana dengan arah kebijakan moneter? Penurunan BI Rate sebesar 50 poin sehingga menjadi 8,75% melalui Rapat Dewan Gubernur 7 Januari 2009 diharapkan dapat menjadi stimulus moneter. Penurunan BI Rate tersebut dilakukan setelah melihat bahwa angka inflasi tahun 2008 hanya 11,06%. Bahkan, BI berani memperkirakan angka inflasi tahun 2009 akan berkisar di level 5% - 7%.

Setelah BI Rate menjadi 8,75%, masalahnya apakah perbankan mau menurunkan tingkat bunga kredit agar dapat membantu menggerakkan sektor riil? Selama ini, respons perbankan atas berubahnya BI Rate membutuhkan waktu 3-6 bulan. Penurunan BI Rate pada Desember 2008, dari 9,50% menjadi 9,25%, belum ditanggapi dalam tempo sesingkat-singkatnya oleh perbankan dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit kini masih bertengger di seputar level 16% - 18%, suatu tingkat bunga kredit yang dirasakan masih sangat memberatkan sektor riil.

Hanya saja, sekarang ini dibutuhkan tidak hanya policy mix makro (baca: fiskal dan moneter), namun koordinasi kebijakan di lingkungan metaekonomi. Lingkungan metaekonomi ini mencakup antisipasi terhadap krisis keuangan global, natural disruption, sektoral, dan daerah. Berbagai bencana datang silih berganti dari tsunami yang melanda Aceh, Sumatera

Utara, dan pantai selatan Jawa, gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan berbagai daerah, banjir, gunung meletus, longsor, serta lumpur panas di Sidoarjo, menambah deret panjang kejadian yang tidak dapat diprediksi dan menimbulkan dampak negatif bagi industri dan perusahaan di daerah tersebut, serta meningkatkan ketidakpastian iklim berusaha.

Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan Indonesia bersifat sektoral dan melibatkan 500-an kabupaten/kota serta 33 provinsi. Ibarat lagu, ada berbagai macam lagu yang dimainkan. Ada keroncong, rock, jazz, gamelan, dan dangdut, dengan "pemain dan penonton" yang berbeda. Inilah pentingnya "sang pemimpin" menjadi dirigen suatu orkestra kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY-JK, agaknya koordinasi kebijakan pada level meta, makro, dan daerah, perlu lebih diintensifkan terutama dalam formulasi dan implementasi program stimulus ekonomi. Semoga koordinasi kebijakan tidak lagi menjadi "barang mewah" dan sebatas retorika di negeri ini.\*